



Judul : Lagi digarap komisi IV, revisi UU Peternakan bela peternak rakyat
Tanggal : Jumat, 17 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lagi Digarap Komisi IV Revisi UU Peternakan Bela Peternak Rakyat

ANGGOTA Komisi IV DPR Slamet menyoroti dominasi perusahaan besar dalam industri peternakan nasional. Kondisi itu berdampak pada melemahnya posisi peternak rakyat sekaligus mengganggu keseimbangan ekosistem dari hulu hingga hilir. Tata kelola peternakan pun mengalami kerusakan akibat situasi yang tidak seimbang.

Slamet mengingatkan, revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan menekankan pengaturan tegas terhadap peran perusahaan besar atau integrator itu. Integrator tidak boleh merugikan peternak kecil serta menengah di lapangan. Fokus utama kebijakan ini adalah memperbaiki struktur industri yang selama ini dinilai sangat merusak tatanan.

Revisi UU ini, kata dia, tidak boleh hanya fokus penguatan aspek profesi seperti insinyur peternakan maupun dokter hewan. Persoalan struktural industri harus jadi prioritas utama dalam perumusan kebijakan nasional. "Penguatan profesi tetap dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan tanpa mengabaikan masalah utama," ingatnya, kemarin.

Kehadiran integrator yang tidak teregulasi dengan baik, sambungnya, merupakan sumber gangguan yang menghambat kemajuan peternak lokal. Makanya, pembahasan revisi UU ini harus membuka ruang masukan dari akademisi serta pelaku usaha terkait pengaturan posisi integrator. Regulasi baru diharapkan menciptakan keseimbangan antara pelaku besar dan peternak rakyat.

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menambahkan, revisi UU ini merupakan langkah mengurangi ketergantungan impor protein hewani. Pasalnya, kebutuhan daging serta susu 280 juta rakyat Indonesia saat ini masih bergantung pada pasokan luar negeri. Itu harus segera dihentikan demi menjaga kedaulatan pangan nasional.

Dia menyebut, persoalan peternakan tidak semata berkaitan dengan jumlah ternak di lapangan. Masalah itu juga menyangkut aspek fundamental seperti penyediaan pakan berkualitas. Selama ini perhatian terhadap sektor hulu seperti lahan hijauan belum optimal mendukung pengembangan industri peternakan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kebijakan pembukaan lahan besar-besaran untuk komoditas tertentu juga belum diimbangi perencanaan ekosistem peternakan memadai. Padahal, keberlanjutan sektor ini sangat bergantung ketersediaan sumber pakan alami. "Satu hektare tanah merumput harus diperhitungkan kapasitasnya untuk menampung jumlah sapi agar efisiensi penggunaan lahan tercapai secara maksimal," tegas Titiek.

Komisi IV, lanjutnya, memandang revisi UU instrumen untuk mengubah arah kebijakan peternakan nasional ke depan. Regulasi yang diperbarui diharapkan mampu mendorong transformasi industri agar lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Langkah ini diambil demi memperbaiki peta jalan industri yang selama ini dianggap masih belum berpihak rakyat. ■ PVB